

## KEHIDUPAN SOSIAL EKS TAPOL/NAPOL PKI SURABAYA DI PULAU BURU TAHUN 1968-1998

**Muklas Hari Mintaji**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[muklasmintaji@mhs.unesa.ac.id](mailto:muklasmintaji@mhs.unesa.ac.id)

**Nasution**

[nasution@unesa.ac.id](mailto:nasution@unesa.ac.id)  
S1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana situasi Surabaya pasca pembubaran Partai Komunis Indonesia 1966, Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana kondisi Surabaya Pasca PKI dibubarkan, 2) bagaimana kehidupan Eks Tapol/Napol PKI Surabaya di Pulau Buru dari awal penangkapan hingga berakhirnya masa Orde Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yakni tahap heuristik mengambil sumber utama dari sumber lisan, yakni wawancara dengan eks Tapol PKI Surabaya yang masih hidup seperti bapak Oei Hiem Hwie, Bapak Handoko, dan Bapak Soeharsojo Goenito. Sumber Arsip seperti, Arsip Kota Surabaya, Himpunan Peraturan-Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Tahun 1955-1969, dan Koran sezaman seperti, Terompet Masyarakat, Harian Umum Jawa Pos, serta buku-buku referensi yang relevan. Tahap kritik dilakukan dengan menganalisis keaslian sumber dan tulisan di dalamnya dengan membandingkan dengan tulisan sejawan yang lain.

**Kata Kunci : Kehidupan, Eks Tapol/ Napol, PKI, Pulau Buru.**

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze how the situation in Surabaya after the dissolution of the Indonesian Communist Party in 1966. The problems discussed in this study are 1) How was the condition of Surabaya after the PKI was disbanded, 2) how was the life of ex-tapol/Napol PKI Surabaya on Buru Island from the beginning of their arrest to the end of their tenure. The new order. The research method used is the historical method, namely the heuristic stage taking the main source from oral sources, namely interviews with ex-PKI Surabaya political prisoners who are still alive such as Mr. Oei Hiem Hwie, Mr. Handoko, and Mr. Soeharsojo Goenito. Archive sources such as the Surabaya City Archives, the Association of Regional Regulations of the Surabaya Municipality in 1955-1969, and contemporary newspapers such as the Community Trumpet, the Jawa Pos General Daily, as well as relevant reference books. The critical stage is carried out by analyzing the authenticity of the sources and the writings in them by comparing them with other contemporary writings.*

**Keywords: Life, Ex-Tapol/Napol, PKI, Buru Island**

UNESA  
Universitas Negeri Surabaya

## PENDAHULUAN

Peristiwa G30S PKI memang menjadi bagian sejarah yang kelam bagi Bangsa Indonesia. Banyak pertumpahan darah yang terjadi dimana-mana ketika para anggota PKI hendak menyingkirkan musuh-musuhnya yang tidak sepaham dengan pemikiran dan ideologi mereka. Di desa-desa PKI menarik simpati para kaum petani untuk menjadi simpatisan atau anggota bagian dan pada akhirnya PKI melakukan Aksi Sepihak terhadap para tuan tanah dan penguasa desa, yang berujung pada aksi pengambil alihan tanah dan penurunan lurah.<sup>1</sup>

Hermawan sulistyio dalam karyanya "The Forgotten Years: The Indonesian Missing History of Slaughter 9 Jombang-Kediri, 1965-1966". Dapat disimpulkan bahwa pembantaian PKI ini tidak dilakukan secara sistematis. Polanya bervariasi dari suatu daerah ke daerah lain. Khususnya menyangkut Jombang dan Kediri, pembasmian PKI merupakan konsekuensi logis dari konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun antara berbagai faksi di dalam masyarakat lokal.

Iwan Gardono Sudjatmiko, dalam buku karyanya membagi dua analisis kehancuran PKI. Pertama analisis yang menekankan perubahan sosial makro, dan yang kedua analisis berdasarkan pola perilaku. Menurut analisis pertama Kehancuran PKI disebabkan terjadinya polarisasi panjang yang mengakibatkan masyarakat transisi dari tradisional ke modern yang tidak dapat dikendalikan sehingga terjadi konflik antara PKI, NU, PNI, TNI. Menurut analisis kedua penyebab kehancuran PKI adalah perubahan pola partai yang menerapkan strategi peking dan meninggalkan pola "Peacefull Co-existence" ala Moscow.

Meskipun pada saat ini PKI sudah di bubarkan akan tetapi masih ada peristiwa setelah pembubaran PKI yang menjadi perhatian saya, yaitu kebijakan pemerintahan Orde Baru tentang pembersihan dan penangkapan terhadap simpatisan atau orang-orang yang dianggap terlibat dan memiliki hubungan dengan PKI. Puncaknya pada tanggal 18 Maret 1965 Soeharto mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap 15 menteri yang setia kepada Soekarno.

Soeharto, seorang perwira tinggi yang mengambil alih kekuasaan militer selama masa kekacauan yang terjadi pada saat itu, menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dalang segala kekacauan ini<sup>2</sup>. Selama beberapa bulan kemudian, ratusan ribu pengikut aliran komunis maupun orang yang diduga pengikut aliran komunis dibantai di Sumatra, Jawa and Bali. Tidak hanya para simpatisan atau orang yang dianggap memiliki hubungan dengan PKI, bahkan orang-orang yang dekat dengan Soekarno dari golongan wartawan, penulis, seniman pun juga ikut di tangkap dan menjadi tahanan politik pada saat itu.<sup>3</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran atau wawasan pengetahuan kepada pembaca tentang kondisi kehidupan sosial Eks Tapol/Napol yang di di Surabaya 1969-1998 secara lebih jelas dan mendalam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan serta dapat memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya akan pentingnya sejarah, sehingga apa yang telah menjadi sejarah bangsa ini tidak hilang di telan masa. Oleh karena itu menarik untuk kita ketahui tentang bagaimana kronologi serta kondisi kehidupan sosial para eks tapol/napol PKI di Surabaya tahun 1969-1998.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian masalah Kehidupan Sosial eks Tapol/Napol PKI di Surabaya, penulis menggunakan metode penelitian fenomenologi dan metode penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis dengan merekonstruksi berdasarkan data-data yang diperoleh dengan menempuh proses historiografi. Tahap awal yang dilakukan adalah tahap heuristik, yaitu proses pencarian sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder.<sup>4</sup> Penelusuran sumber dilakukan dengan cara mencari berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian ini, baik di perpustakaan Pusat Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Nasional Indonesia (Menghasilkan koran-koran sejaman dan buku-buku referensi), Pusat Dokumentasi TNI Satria Mandala (mendapatkan artikel-artikel TNI, Surat Keputusan, koran sejaman), Perpustakaan Daerah Jawa Timur, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya dan Asip Nasional Provinsi Jawa Timur.

Selain sumber tertulis guna melengkapi proses heuristik, juga dilakukan interview kepada sumber primer yakni pelaku sejarah tahun 1965 (Tapol/Napol) dan tokoh-tokoh yang kontra komunis. Pengambilan sample Tapol/Napol menggunakan random sample (sample acak) dan untuk tokoh-tokoh kontra komunis menggunakan purposive sample (sample bertujuan) artinya penulis menentukan sample sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini adalah para tokoh kontra PKI yang paham dengan masalah yang akan diteliti.

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap berikutnya adalah verifikasi atau lazim disebut dengan kritik untuk memperoleh keabsahan dan keaslian sumber.<sup>5</sup>

Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan dan keaslian sumber autentik yang dilakukan melalui kritik ekstern dan kredibilitas sumber ditelusuri dengan kritik intern. Dalam penelitian ini penekanan banyak diberikan pada studi literatur yang mengutamakan isi sumber berdasarkan kredibilitasnya. Abtara sumber primer dan sekunder diadakan perbandingan sehingga dapat saling melengkapi.

Kemudian langkah yang selanjutnya adalah tahap interpretasi, interpretasi sering disebut juga dengan

<sup>1</sup> Aminuddin Kasdi. 2001. *Kaum Merah Menjarah : Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta : Jendela, hlm 17.

<sup>2</sup> Nugroho, Ismail Shaleh. 1989. *Tragedi Nasional Percobaan KUP G30SPKI di Indonesia 1968*. Jakarta : Intermasa, hlm 35.

<sup>3</sup> Robert Cribb. 2016. *The Indonesian Killings : Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta : Mata Bangsa, hlm 23.

<sup>4</sup> Louise Gotchalk. 1985. *Mengerti Sejarah (terjemahan)*. Jakarta: UI Press, hlm 32.

<sup>5</sup> Dudung Abdurahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Wacana Ilmu, hlm 58.

istilah penafsiran sejarah atau analisis sejarah. Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh guna mengungkap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama. Setelah data terkumpul lalu data disimpulkan untuk kemudian dibuat penafsiran keterkaitan sumber yang diperoleh.<sup>6</sup>

Sebagai tahap terakhir dari metode sejarah adalah historiografi. Historiografi adalah menuliskan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan, dimana fakta-fakta tersebut disusun secara sistematis dan kronologis untuk membangun sebuah konstruksi masa lampau dalam bentuk sejarah sebagai kisah tertulis.

## HASIL PENELITIAN

### A. Kondisi Surabaya Pasca Pembubaran PKI

#### 1. Dasar Yuridis Pembubaran PKI

Ada beberapa ketetapan ataupun Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah sehubungan dengan pelanggaran paham komunisme dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang. Ketetapan tersebut antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia nomor XXV/MPRS/1966, tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan, mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

2. Surat Keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi nomor: 1/3/1966, tentang PKI sebagai organisasi terlarang. Berisi sebagai berikut :

a. Membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya yang se azas/berlindung/bernaung di bawahnya.

b. Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. (ditetapkan oleh Mayjend Soeharto di Jakarta 12 Maret 1966)

3. Surat Keputusan Departemen Angkatan Darat ( Menteri/ Panglima Angkatan Darat) nomor : KEP-1196/10/1965 tentang perkara-perkara orang sipil yang terlibat dalam Gerakan 30 September yang harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer Angkatan Darat.(ditandatangani dan disahkan oleh Mayjend Soeharto)

4. Surat Keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi, tentang pelaporan diri anggota EX PKI. Berisi tentang :

a. Menyerukan kepada semua anggota pimpinan, kader- kader dan aktivis-aktivis dari organisasi kontra Revolusi PKI beserta organisasi-organisasi massanya yang se azas/bernaung/berlindung di bawahnya untuk masing-masing melaporkan diri kepada PEPELRADA/PEPERDA dan atau pejabat-pejabat yang ditunjuk olehnya, di daerah dimana saudara-saudara berdiam selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 1966.

b. Apabila jangka waktu yang telah ditetapkan tidak dipenuhi maka yang berwajib akan mengambil tindakan tegas. (Keputusan Mayjend Soeharto 14 Maret : Jakarta)<sup>7</sup>

#### 2. Konflik Sosial di Surabaya Pasca G-30 S

Pasca peristiwa G-30 September, kondisi situasi politik di Surabaya mulai berubah. Sebelum terjadi peristiwa tersebut, struktur pemerintahan didominasi oleh kaum komunis maka kini militer dan partai-partai anti komunis duduk didalam pimpinan pemerintahan. Letkol R. Soekotjo yang sebelumnya menjabat sebagai Dandim 0830 Surabaya dilantik menjadi Walikota Surabaya menggantikan Moerachman yang diduga terlibat dalam organisasi PKI. Begitu pula pimpinan DPRD-GR Surabaya digantikan oleh KH. Zaky Gufron dari partai NU.

Sukotjo, komandan Kodim 0830/Kota Surabaya, menggantikan Moerachman sebagai walikota Surabaya yang ditangkap karena memiliki hubungan dengan PKI. "Keterangan yang ada menyebutkan walaupun beliau bukan PKI, tetapi memiliki hubungan yang dekat dengan partai yang pada Pemilu 1955 ini memperoleh suara terbanyak di Kota Surabaya."<sup>8</sup>

Di Surabaya, menurut Antonius Sumarwan "Kisah Tragis Tapol '65 dan Upaya Rekonsilias", aksi dimulai pada 16 Oktober 1965 dengan pawai akbar dan tindakan terorganisir untuk menghancurkan dan membakar kantor Komite Daerah Besar PKI di Jalan Pahlawan, kemudian walikota sementara, Kolonel Sukotjo, membersihkan staf pemerintahan, Rukun Kampung (RK) dan Rukun Tetangga (RT) dari unsur PKI.

Dalam arsip kota Surabaya (Box :868 No.18183) di jelaskan bahwa pemerintahan Soekotjo membentuk tim penyelesaian dan penertiban yang berkaitan dengan kasus-kasus tanah yang terjadi di Surabaya pada masa sebelum terjadinya G-30 S. Penyelesaian tersebut antara lain penyelesaian tanah/sawah Tembokdukuh yang dipimpin oleh Putro Sumantono yang juga merangkap sebagai Camat Bubutan Surabaya. Selain itu pemerintah Surabaya juga melakukan pembongkaran di kompleks Kalikobor Ngagel Surabaya. Bahkan sebelum pembongkaran dilakukan penduduk setempat melakukan resolusi kepada pemerintah kota Surabaya unruk segera menertibkan bangunan-bangunan liar di kompleks Kalikobor tersebut.

Sebagai upaya tindak lanjut atas persoalan tersebut pengadilan negeri Surabaya yang dipimpin oleh Djoko Soegianto SH, mulai mengadakan sidang pengadilan darurat terhadap semua pelanggaran peraturan-peraturan kotapradja Surabaya, seperti pelanggaran pendirian bangunan di sepanjang kali peneleh Surabaya yang dimasasebelumnya mendapat izin. Selain penyelesaian masalah-masalah tanah di Surabaya (Arsip Kota Surabaya (Box :1272 No. 26903). Pemerintah kota Surabaya juga melakukan perubahan terhadap pedoman-pedoman kemasyarakatan. Perubahan tersebut dengan dikeluarkan Surat Keputusan DPR-GR Kotamadya

<sup>7</sup> Keputusan Panglima TNI No. 3. 1996.

<sup>8</sup> Sarkawi Husain. 2010, *Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan*, Jakarta: LIPI Press, hlm 32.

Surabaya No. 47/DPRD/1968 yang menetapkan PERDA tentang pedoman umum mengenai tugas serta kewenangan organisasi Rukun Tangga dan Rukun Warga dalam daerah Kotamadya Surabaya. Surat DPRD-GR tersebut diperkuat oleh Surat Keputusan Walikotaamadya Surabaya No. 702/K tertanggal 26 Oktober 1968.

Dalam Arsip Kota Surabaya (Box :1272 No. 26903) bisa kita ketahui bahwa dalam bidang pendidikan melalui surat Intruksi Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan Masyarakat Perwakilan Departemen Jawa Timur Abdulah Sadjat menginstruksikan kepada sertiap kepala Inspeksi di kabupaten dan kotapradja menindak setiap anggotanya yang terlibat dalam G-30 September dengan pemecatan dan pengumpulan pernyataan loyaliteit kepada pemerintah terhadap pegawai lainnya.

Selain pemerintah Kotapradja Surabaya yang berupaya menegakkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum di Kota Surabaya. Pihak organisasi-organisasi massa yang ada di Surabaya berupaya menunjukkan loyalitasnya pada pemerintahan baru dengan melakukan pernyataan kebulatan tekad mendukung setiap upaya pemerintah yang baru di Kota Surabaya, seperti yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah SOKSI Jawa Timur yang mengeluarkan pernyataan mendukung setiap upaya pemerintah menjaga stabilitas Nasional.

#### **B. Kehidupan Eks Tapol/Napol PKI Surabaya di Pulau Buru.**

##### **1. Letak Geografis dan Awal Kehidupan**

Pulau Buru diketahui memiliki luas kurang lebih 9.000 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sekitar 63,687 jiwa. Dua pertiga bentang alamnya berupa gunung dan bukit dengan ketinggian rata-rata 900-1500 meter, dari puncak tertinggi disebut gunung Kapalatmada dengan ketinggian 2429 m terletak disudut barat laut pulau. Daerah pesisir pulau berupa tanah datar sempit. Adapun tanah datar yang lebih luas terbentang disepanjang lembah sungai Wai Apo.

Pulau ini dibagi menjadi dua daerah administratif bertaraf kecamatan, yaitu Buru Selatan dan Buru Utara. Konon Buru Selatan sudah lebih terbuka dan padat penghuni dibanding dengan Buru Utara. Kekayaan hutan sudah digali, tentu bukan dari penduduk setempat yang sekedar menghidupi diri dari pertanian sawah dan ladang.

Dari jumlah keseluruhan 750 orang tapol, 436 orang diantaranya dipisahkan dari barisan, untuk selanjutnya di tempatkan di satu unit dengan nama unit sanleko. Unit yang kelak bernama Unit IV Savanajaya. Disebut demikian karena letaknya berada di kawasan desa Sanleko. Ketika itu, sebelum rombongan 436 orang ini datang, Unit Sanleko sudah dihuni oleh tapol dari dua rombongan terdahulu, yaitu sebanyak 110 orang dari rombongan tahun 1969, dan sebanyak 64 orang dari rombongan tahun 1970 gelombang pertama, dengan demikian berikutr dengan datangnya rombongan tahun 1970 gelombang kedua yang jumlahnya 436 tersebut maka

jumlah seluruhnya 610 tapol yang mendiami unit Sanleko<sup>9</sup>.

Hesri juga mngatakan bahwa mereka itulah para pengukir sejarah unit Sanleko yang sejak 1 Desember 1970 secara resmi dinyatakan dibuka. Tanpa cangkul pertama, tetapi dengan cangkul bersama dari semua tapol penghuni. Sementara itu unit-unit lain, yaitu unit I, II, dan III semuanya terletak dilembah dan seberang sungai Wai Apo pada jarak terdekat dengan unit Sanleko sekitar 11-13 Km.

Pemindahan para Tapol dari nusakambangan ke Pulau Buru dimulai sejak pertengahan 1969. Mereka yang diasingkan ke pulau Buru sampain dengan tahun 1972 sejumlah 10.652 orang termasuk beberapa keluarga tapol. Pemindahan mereka berlangsung dalam beberapa gelombang. Pada Tahun 1969 dikirim 2.500 tapol(850 tapol pada bulan Agustus dan 1.650 bulan Desember). Satu tahun berikutnya diberangkatkan 5.000 orang dimulai sejak Juli, Agustus dan terakhirbulan September. Gelombang pengiriman sebanyak 2.500 Tapol juga berlangsung sejak Agustus sampai September 1971. Keluarga Tapol yang ikut menyusul pada Juli 1972 sebanyak 164 orang istri, 485 anak-anak, dan 3 orang ibu(orang tua perempuan). Pemindahan berikutnya berlangsung pada setiap pertengahan tahun.<sup>10</sup>

Kisah pulau Buru sebagai pulau pengasingan/pembuangan dimuali ketika 850 tapol golongan B dikirim dari Jawa merapat di pelabuhan Namlea pada 4 September 1969. Kejaksanaan Agung sesuai dengan surat keputusan Pangkokamtib No. 1/1969 ditunjuk sebagai pihak yang menyelenggarakan dan melaksanakan resettlement tapol golongan B ke Pulau Buru. Menurut Jaksa Agung Sugir Arto, proyek kemanusiaan untuk merehabilitasi para tapol golongan B agar kembali menjadi insan pancasilais dan tidak lagi menganut ideologi polotik komunis. Kejaksanaan Agung kemudian mendelegasikan tugas pelksanaan proyek kemanusiaan tersebut kepada pihak militer di bawah tanggung jawab Badan Pelaksana Resettlement Buru (BAPRERU).

Secara berangsur- angsur para Tapol didatangkan dari Jawa sejak tahun 1969 sampai 1975. Mereka menempati 22 unit yang tersebar di daerah pedalaman lembah Way Apo yang bertetangga dengan kampung-kampung Soa yaitu penduduk asli setempat. Pangkokamtib Laksaman Sudomo memberikan penjelasan di Jakarta pada 2 Desember 1975 bahwa Tapol yang ditempatkan di Pulau Buru dianggap sudah dapat menetap dan bercocok tanam, sehingga tidak perlu dikembalikan atau dibebaskan ke daerah asal masing-masing.

Pulau Buru dibagi dalam unit-unit yang tersebar di lembah sungai Way Apo. Rombongan pertama ditempatkan diunit 1 (Wanapura) dan unit II (Wanareja), dan unit III (Wana Yasa). Setiap Unit rata-rata dihuni sekitar 700-1000 tapol (unit I dan II) dan 500-800 tapol (unit III sampai XVIII. Unit-unit terakhir pada masa itu di

<sup>9</sup> Hesri Setiawan. 2018, *Di Buru di Pulau Buru*, Yogyakarta: New Merah Putih, hlm 9.

<sup>10</sup> Achmadi Moestahal. 2002. *Dari Gontor ke Pulau Buru*, Yogyakarta: Syarikat, hlm 288.

Komandani oleh Letkol Sutikno. Unit inib rata-rata berpenghuni 500 Tapol. Pada unit R,S dan unit T didirikan tenaga *korve* (kerja paksa) oleh tapol unit-unit terdahulu. Jumlah penghuni tiap unit tidak selalu sama.

Penghuni T Wanareja misalnya berjumlah 882 pada tahun 1971. Tujuh tahun berselang tersisa 576 tapol. Perubahan (penambahan/pengurangan) penghuni tiap unit bisa disebabkan tapol dibunuh oleh penduduk asli, tewas akibat disiksa petugas, mati karena putus asa (bunuh diri) atau sakit, mutasi, dibuang ke kamp isolasi/karantina jukucecil, atau di "bon" (pulangan/pemeriksaan) ke Jawa.<sup>11</sup>

Pengasingan atau pembuangan ke Pulau Buru semula memang direncanakan seumur hidup. Indikasi ini dapat kita lihat dari upaya pemerintahan Orde Baru untuk melakukan resettlement dan upaya penyatuan kembali keluarga (*gezinshereniging*) dengan mendatangkan keluarga baik istri, anak, atau orang tua tanggungan tapol. Upaya mendatangkan keluarga tapol tersebut dilakukan dengan berbagai cara halus dan kasar.

Kamp jukucecil terletak sekitar 40 kilometer dari Namlea. Tadinya kamp itu dipakai sebagai tempat penampungan pertama (sementara) tapol pendatang baru dari Jawa setelah semua unit selesai dibangun, kamp tersebut beralih fungsi sebagai kamp penghukuman yang dipakai untuk menginterogasi, memeriksa, menganiaya, dan mengisolasi para tapol yang dituduh tidak kolaboratif dan kooperatif terhadap petugas yang menjagaa mereka dalam kamp dan melanggar aturan yang tidak tertulis yang ditentukan penguasa inrehab Buru. Kamp penjara di pulau Buru dikelilingi kawat berduri berlapis 5 yang diisi semula 70 orang tapol kiriman berbagi unit, terutama unit I, II, dan III.

Dengan meningkatnya pelanggaran yang dituduhkan kepada tapol, kamp hukuman ini sempat dihuni 85 orang tapol. Sama seperti unit-unit lain, penghuni kamp jukucecil dipaksa bekerja disekitar maupun tempat yang jauh dari kamp mereka. Keseharian mereka menanam sayuran, membakar batu kapur, mencari bakar di hutan, memasak serta menjadi pelayan termasuk mencuci dan menyetriska pakaian-pakaian serdadu adalah bagian wajib (*korve*) penghuni kamp jukucecil. Seluruh pekerjaan dilakukan sejak pukul 04.00 pagi sampai pukul 20.00 malam. Kerja yang dilakukan diluar waktu yang ditentukan dianggap sebagai pembangkangan dan dapat dikenakan tuduhan mencari kesempatan membuat keonaran atau kekacauan. Tapol yang enggan melayani penjaga kamp atau tidak hadir pada apel harus siap menerima hukuman berupa tamparan, pukulan, tendangan dan diikat pada gerobak yang dijalkan, dijemur dibawah sengatan matahari atau disiram air panas.

Kerja wajib (*korve*) adalah rutinitass sehari-hari para tapol. Selama lebih dari 10 jam mereka harus berada diluar barak masing-masing bekertja dalam berbagi proyek.Seluruh kegiatan diawali dengan bangun pagi, kemudian sarapan pagi pada pukul 04.00 dini hari dilanjutkan gerak badan serta apel pada pukul 04.30-05.00 WIT. Setelah itu mengambil peralatan kerja di

gudang unit dan bekerja hingga pukul 12.00 siang, kemudian para tapol makan siang dan istirahat selama satu jam. Kerja dilanjutkan hingga pukul lima sore tanpa istirahat. Waktu luang sebelum pukul 19.00 malam digunakan untuk olahraga, memancing, mencari umpan ternak, mandi, makan atau berbincang dengan teman sebarak.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Periode tahun 1960-an memang merupakan puncak pertikaian yang sangat akut antara kelompok kanan dan kiri, dilihat dari semua itu tentusaja tragedi 30S/PKI yang sebab akibatnya telah menciptakan guncangan yang luar biasa pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dibuktikan dengan terlibatnya seluruh elemen masyarakat dalam pusaran konflik baik yang bersifat vertikal maupun horisontal.

Pasca PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang terjadi kekacauan yang cukup parahyang berujung pada penahanan, pembunuhan dan pengasingan terhadap kelompok-kelompok yang diidentifikasi sebagai anggota PKI. Kehidupan para eks Tapol ketika diasingkan ke pulau buru dihabiskan dengan bekerja, mulai dari apel pagi, membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan hingga kerja korve atau kerja wajib yang harus dikerjakan oleh para Tapol kala itu. Selain itu mereka menghabiskan waktu senggang dengan istirahat atau sekedar berbagi kisah dengan para Tapol lainnya.

Namun disisi lain Kehidupan para Tapol di Pulau Buru juga tak selalu mendapatkan aksi kekerasan dari para petugas penjaga barak, mereka juga mengalami kejadian-kejadian lucu seperti yang dialami oleh Pak Greg dan juga rekan-rekannya ketika sedang istirahat bekerja. Mereka juga masih bisa tetap meneruskan profesinya seperti sebelum mereka di asingkan. Ada yang menjadi mantri atau dokter, ada yang masih menulis buku seperti Pak Pramodya, bahkan mereka memiliki grup keroncong untuk menghibur para penjaga barak dan ditampilkan ketika hari-hari tertentu. Dimana salah satu anggota grup keroncong itu sendiri adalah pak Greg yang mana beliau adalah seorang seniman dari Lembaga Kebudayaan Rakyat ( Lekra) yang juga mahir dalam bermain alat musik.

Para Tapol/Napol pulau Buru ketika mereka kembali ke Surabaya atau ke tempat tinggalnya mayoritas mengalami pergolakan hidup utamanya dalam kondisi sosial ekonomi, karena sangsi moral dan termarginalkan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan menurut keterangan beberapa Tapol mereka sampai pindah tempat tinggal agar bisa memulai kehidupan yang baru dengan lingkungan yang berbeda. Dampak sosial ekonomi merupakan faktor terberat yang dialami eks Tapol/Napol, karena stigmatisasi komunis yang melekat pada mereka telah membuat beberapa Tapol kehilangan kesempatan mendapatkan karir yang lebih baik bahkan di KTP mereka ada cap ET atau Eks Tapol yang menyebabkan mereka kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga hal ini menyebabkan mayoritas Tapol melanjutkan hidup mereka dengan meneruskan hobby seperti sebelum waktu di asingkan ke

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 301

Pulau Buru dan juga memilih untuk membuka usaha sendiri seperti berjualan.

## 2. SARAN

Dari seluruh uraian diatas ada beberapa saran yang bisa penulis sampaikan, antara lain :

- Setiap kelompok masyarakat yang ada di negeri ini seyogyanya menahan diri dan memiliki sikap toleransi atas segala perbedaan yang ada karena memang bangsa kita adalah Bhineka Tunggal Ika.
- Saat ini konflik antara komunis dan antikomunis sudah nyaris tidak ada, hal ini tentu perlu ditindak lanjuti dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama pada setiap Warga Negara.
- Komunisme telah dilarang hidup dan tumbuh di Indonesia, berkaitan dengan hal tersebut seluruh elemen masyarakat harus menghormati dan patuh atas keputusan Undang-Undang tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Budi Irwanto. 2016. *Membaca Narasi Sejarah Hak Asasi Manusia Melalui Memoar Pulau Buru*. Jurnal UGM
- Andreas Eka. 2016. *Dinamika Kehidupan Tahanan Politik Pulau Buru 1965-1970*. Lumbung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta
- Aminuddin Kasdi. 2014 : *Kaum Merah Menjarah : Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Surabaya :Unesa University Press
- Louise Gottchalk.1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta :UI Press
- Dudung, Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta :Logos Wacana Ilmu
- Sartkawi Husein.1960. *Negara di Tengah Kota. Politik Representasi dan Symbolisme Perkotaan Surabaya 1930-1960*. Jakarta: LIPI Press
- Hersri Setiawan.2016. *Memoar Pulau Buru*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia
- Hersri Setiawan.2006. *Di Buru di Pulau Buru*. Yogyakarta : Galang Press
- Gregorius. 2017. *Tiada Jalan Bertabur Bunga*. Yogyakarta : INSISTPress
- Achmadi Moestahal.2002. *Dari Gontor Ke Pulau Buru*. Jakarta : Syarikat Press

Sumber Wawancara :

- Wawancara Bapak Oei Hiem Wiek bulan April 2020
- Wawancara Bapak Sugondo bulan Juni 2020
- Wawancara Bapak Gregorius Soeharsojo Goenito bulan Agustus 2020

Sumber Arsip :

- Arsip Kota Surabaya (Box :1272 No. 26903)
- Arsip Kota Surabaya (Box :1272 No. 26903)

Sumber Internet :

- <https://historia.id/politik/articles/penumpasan-pki-di-surabaya-6joym> diakses pada 15 Oktober 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/fokus/jejak-penjara-tapol-pulau-buru-3103/all> diakses pada 25 Oktober 2020

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/30/g30s-pulau-buru-tempat-pembuangan-tahanan-politik-di-masa-orde-baru> diakses pada 26 Oktober 2020



